

## DARI MONARKI MENUJU REPUBLIK ISLAM Menengok Iran Masa Lalu dan Masa Modern

Syamsun Ni'am

Dosen Tarbiyah STAIN Jember  
niamstainjbr@gmail.com

### Abstrak

*Iran dalam sejarahnya yang panjang telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat dinamis, baik dilihat dari perspektif geografis, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan juga agama. Iran adalah di antara negara yang berada di Timur Tengah yang memiliki kekayaan melimpah dari sumber daya alam (minyak bumi). Dalam perspektif sosial-politik global dan agama, Iran menjadi negara yang patut dicurigai dan bahkan ditakuti oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan antek-antek Yahudi lainnya, karena Iran dianggap sebagai negara Muslim yang paling berani menentang kebijakan-kebijakan Barat yang memiliki ambivalensi dalam melihat negara Muslim. Iran telah mengalami perubahan cukup dinamis baik dari perspektif politik, budaya, maupun agama. Ini yang kemudian menarik untuk dikaji dalam makalah ini. Karena sedikit banyak akan berimplikasi kepada negara-negara Muslim lain di dunia.*

**Kata Kunci:** *Iran, Monarki, dan Republik Islam*

### Pendahuluan

Iran merupakan sebuah negara di wilayah Timur Tengah, Asia Barat Daya. Negara ini menjadi sangat kaya setelah ditemukannya minyak bumi sejak awal abad ke-20 M. Sebelum masa Revolusi Iran (1978-1979)<sup>1</sup> dan

---

<sup>1</sup> Awal mula munculnya pemikiran revolusi dalam dunia Islam disebabkan oleh munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan otokrasi (monarki) yang dijalankan oleh pemerintah dan cenderung meniru dan mengadopsi pola pemikiran barat yang sekuler. Hal ini membangkitkan perlawanan para ulama yang kemudian membentuk gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintah. Revolusi Islam Iran digerakkan oleh kaum shi'ah yang telah menimbulkan pengaruh yang cukup besar di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Pengaruh tersebut berupa munculnya gerakan-gerakan Islam "Fundamentalis", "Radikal", "Militer", maupun "Ekstrem". Lihat M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah* (Bandung:

penggulingan shah Iran dari tahtanya, negara Iran berbentuk monarkhi (kerajaan). Dalam perjalanan pemerintahannya, para penguasa kerajaan Iran banyak melakukan penindasan-penindasan masif atas nama pembaharuan dan modernisme. Dalam menentang kekerasan dan perlakuan kasar para penguasa, kelompok ulama cenderung diam karena tidak mempunyai keberanian. Sehingga bermunculan kelompok oposisi di berbagai daerah yang menentang kebijakan shah, dan pada akhirnya muncullah tokoh Khomeini sebagai penggerak demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah tersebut.

Puncak dari gerakan ini terjadi pada 1978-1979 yang berakhir dengan tumbangannya rezim Shah yang berarti terhapusnya sistem pemerintahan kerajaan dan terbentuknya sebuah Republik Islam Iran. Dalam *reading assignment* ini penulis mencoba untuk mengeksplorasi berbagai persoalan yang terjadi pada masa pemerintahan Iran berbentuk kerajaan, peranan Khomeini dalam proses tumbangannya rezim Shah dan dihapusnya sistem kerajaan menjadi Republik, serta praktek pemerintahan Republik Islam Iran.

### **Pemerintahan Monarkhi Iran Pra-Khomeini**

Iran mulai dihuni jauh sebelum Masehi oleh orang-orang non Islam.<sup>2</sup> Baru pada 1502 dinasti Safavid (1502-1736) yang merupakan keturunan Iran memegang kekuasaan. Tahun 1779-1924 kekuasaan beralih ke dinasti Qajar.<sup>3</sup> Tetapi ketika itu, Iran sudah mulai mendapat campurtangan Eropa yang ingin menentukan masa depan Iran. Kelaparan dan kebangkrutan negara akibat perang dunia I memberi peluang bagi Reza Khan menjadi Shah dan

---

Mizan, 1993), 191.

<sup>2</sup> Iran mulai dihuni seratus ribu tahun yang lalu. Namun rekaman sejarah baru berawal dari tahun 3000 SM, dengan suku bangsa Elamit di Khuzestan. Sejak tahun 550 SM Raja Cyrus II yang Agung mendirikan dinasti Achaemenid, dan pada 350 SM, Alexander Agung mengalahkan kerajaan Achaemenid. Lalu tentara Parthia merebut Iran dan berkuasa hingga 224 M. Ketika Kerajaan Parthia mulai melemah, dinasti Sasanid berkuasa dengan menetapkan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara. Hingga 640 M Iran dikuasai Arab Muslim non Iran. Baru pada 1502-1736, Dinasti Safavid, keturunan Iran memegang kekuasaan. Lihat Ansis Kleden, "Iran," *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, vol. 2. Tim Penyusun Ensiklopedi Islam (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), 223.

<sup>3</sup> Nikki R. Keddie and Eric Hooglund, *The Iranian Revolution and The Islamic Republic* (New York: Syracuse University Press, 1982), 7; Vanessa Martin, *Islam and Modernism, The Iranian Revolution of 1906* (New York: Syracuse University Press, 1989), 35; Guity Nashat, *The Origins of Modern Reform in Iran, 1870-80* (London: University of Illinois press, 1982), 5-6.

mengganti namanya menjadi Pahlavi.<sup>4</sup>

Tepatnya pada 1921, Reza Shah naik tahta, pemerintahannya di bangun diatas landasan penindasan masif yang dilakukan atas nama pembaharuan. Shah dengan brutal menghancurkan pemberontakan rakyat, melenyapkan oposisi politik dan melancarkan serangan pembaharuan administrasi dan ekonomi.<sup>5</sup>

Secara praktis setiap sektor pembaharuan yang dilaksanakan hanya merongrong hak-hak istimewa para ulama, sekolah-sekolah dan universitas-universitas modern tipe barat didirikan, hukum-hukum baru diundangkan dan pengadilan-pengadilan baru didirikan untuk mengelola hukum tersebut, berbagai dinas kesejahteraan rakyat disekulerisasikan, merongrong monopoli kaum ulama, dan mengurangi nilai sistem madrasah. Pejabat-pejabat tinggi pemerintah tak lagi diangkat dari lulusan madrasah, melainkan dari alumni universitas atau dari kalangan mereka yang dikirim ke luar negeri dengan beasiswa pemerintah. Dibentuknya kementerian wakaf, merongrong peranan ulama dalam mengelola harta-harta wakaf. Di bidang sosial, pemerintah juga melarang pemakaian cadar di muka umum bagi kaum wanita dan melarang ritus-ritus tertentu dalam upacara keagamaan secara tradisional.<sup>6</sup> Menghadapi tindakan-tindakan Reza Shah yang merugikan mereka ini, para ulama Iran umumnya bersikap menentang secara diam saja.<sup>7</sup>

Tahun 1941, Reza Shah digantikan oleh anaknya, Muhammad Reza Shah Pahlavi. Pemerintahannya mendapat dukungan militer, ekonomi, dan

---

<sup>4</sup> Dinasti Pahlevi (nama pra-Islam) dan lambang pra-Islam (singa dan matahari) berkuasa sejak tahun 1925-1979 di Iran. Shah pertama dinasti ini bernama Reza Pahlavi, yang semula adalah pemimpin pasukan militer Cossach. Lihat Cyrill Glase, *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 313.

<sup>5</sup> Nikki R. Keddie, *Religion and Politics in Islam* (London: Yale University Press, 1983), 59-60.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 60; William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, ter. Taufik Adnan Amal (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 273; Nikki R. Keddie, *Roots of Revolution: an Interpretative History of Modern Iran* (Binghamton, Yale University Press, 1981), 89; Dalam sistem pembaharuannya Reza berusaha memordenisasi Iran dan berselisih dengan tokoh agamawan, yakni lembaga Mullah. Modernisasi yang dilakukan Reza berbeda dengan Attaturk di Turki, karena dia tidak menjalankan sekulerisasi secara menyeluruh, dia tidak menghapuskan lembaga keagamaan, tetapi hanya membatasi dan mengontrol mereka. Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 1990), 604.

<sup>7</sup> Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politic of Islam* (New York: Fintage Book, 1982), 310.

politik dari Amerika Serikat. Ia juga memajukan negaranya lewat program modernisasi dan westernisasi. Pemerintahan Muhammad Reza Pahlevi sangatlah absolut. Ia menguasai angkatan bersenjata dan *savak* (agen rahasia politik dan intelijen) mengangkat para menteri dan memanipulasi dewan parlemen. Elite pegawai, administrator, tuan tanah, dan sejumlah pedagang kaya mendominasi kehidupan politik Iran. Rezim Shah semakin terikat dengan Amerika secara finansial maupun bantuan militer. Program Pahlevi menyerukan pembangunan negara sekuler dan modernisasi masyarakat yang sejalan dengan modernisasi barat. Dilakukan juga reformasi pertanian yang terkenal dengan “Revolusi Putih” atau reformasi pertanahan.<sup>8</sup> Ia juga menyerukan pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat dan memberikan hak suara kepada wanita, bahkan banyak wanita yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Revolusi putih ini diam-diam ditentang ulama. Kekuasaan yang besar di tangan Shah menyebabkan munculnya banyak oposan, terutama dari kalangan mahasiswa, intelektual dan ulama. Para pemimpin Islam konservatif menganggap rencana modernisasi ini merusak ajaran-ajaran Islam. Untuk melawan para oposan ini, Shah menggunakan polisi rahasia untuk menangkap mereka.

Akhirnya pada awal 1970-an berbagai penentang Shah bergabung di bawah pimpinan Ayatullah Ruhullah Khumayni dan mengadakan demonstrasi massal menentang Shah.

### **Peranan Khumayni dalam Proses Revolusi**

Imam Khumayni nama lengkapnya adalah Ruhullah ibn Musthafa al-Musawi Khumayni, lahir di Khumain dekat kota Isfahan pada bulan Sep-

---

<sup>8</sup> Revolusi putih merupakan gerakan yang disosialisasikan Shah dalam rangka perbaikan sosial ekonomi. Revolusi ini terjadi pada 1960-an. Lihat Lapidus, *A History*, 611. Kekayaan yang ada di tangan para tuan tanah dibagi-bagikan kepada para petani. Di Iran kepemilikan tanah memusat pada tuan-tuan tanah dari keluarga pejabat. Sedangkan para petani kecil tidak ke-banyakan tidak mempunyai tanah. Sehingga pada 1962-1964 dan 1968, para tuan tanah di paksa oleh undang-undang agar menjual kelebihan tanah kepada tuan tanah kecil, namun terjadi banyak penyimpangan sehingga distribusi tanah tidak sebaik yang di harapkan. Lihat Watt, *Fundamentalisme*, 274; Bizhan Zajani, *Capitalism and Revolution in Iran* (London: Zed Press, 1980), 53-54.

tember 1902 M dan meninggal pada 3 Juni 1989.<sup>9</sup> Khumayni belajar di bawah bimbingan Ayatullah Hairi Yazdi di Sultanabad pada tahun 1919 dan di Qumm pada tahun 1922. Setelah gurunya wafat, dia mulai mengajar dengan mengambil spesialisasi ilmu kalam, akhlak, filsafat, dan tasawuf (irfan).<sup>10</sup> Dalam usia yang relatif muda pada tahun 1926 Khumayni telah mencapai tingkatan mujtahid dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian ia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian dianut oleh masyarakat Shi'ah. Ia dipilih sebagai seorang *marja' al-din*<sup>11</sup> setelah wafatnya Ayatullah Burujirdi.

Pada tahun 1944 muncul buku Khumayni yang berjudul "Kasyf al-Asror" dan menyatakan bahwa pemerintahan kerajaan Iran harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syari'at sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mujtahid, juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan oleh para mujtahid adalah lebih baik. Buku ini ditulis sebagai jawaban terhadap tulisan-tulisan Ahmad Kasrawi dan para pengikutnya, yang mengutuk oposisi terhadap Reza Shah sebagai campuran reaksioner dari fanatisme, tahayyul, dan kerusakan (*corruption*).<sup>12</sup>

Selama kepemimpinan spiritual Ayatullah Burujirdi (1875-1962) Khumayni tetap menyesuaikan diri dengan kepemimpinan Burujirdi dan bersikap diam secara politik. Tetapi, sejak tahun 1960 hingga seterusnya, ketika Burujirdi sendiri menempuh garis politik aktif dan khususnya Burujirdi telah

---

<sup>9</sup> Baqer Moin, "Khomeini, Ruhollah al-Musavi," *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol. 2. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), 427-430. Khumayni adalah keturunan keluarga Imam Musa al-Kadhim ibn Ja'far al-Shadiq (Imam Syi'ah isna Asy'ariyah ke-7). Kakeknya adalah seorang pedagang yang telah berdagang selama beberapa waktu lamanya di India. Oleh karena itu, keluarganya terkadang disebut dengan al-Hindi. Gelar "Imam" yang merupakan gelar kehormatan tertinggi ulama Shi'ah diperolehnya secara spontan dari para pendukungnya semasa pergolakan taun 1978-1979. Gelar ini diusulkan oleh Ayatullah Syari'at Madhari, yang kemudian disetujui oleh sejumlah Ayatullah lainnya.

<sup>10</sup> Keddie, *Roots of Revolution*, 205-206. Khumayni belajar di Pusat Pendidikan Agama atau *Hauzah Ilmiah* di kota Arak. Dalam bidang filsafat dan irfan, Khomayni belajar langsung dari Shaikh Muhammad Ali Shah Abadi, seorang filsuf yang arif dari Iran.

<sup>11</sup> Maksudnya sebagai tempat kembalinya umat dalam persoalan-persoalan agama atau pucuk pimpinan spiritual dalam masyarakat Shi'ah. Lihat Watt, *Fundamentalisme*, 280.

<sup>12</sup> Keddie, *Roots of Revolution*, 199; Nashat, *The Origins*, 12; Donald N. Wilber, *Iran Past and Present: From Monarchy to Islamic Republic* (New Jersey: Princeton University Press, 1981), 332.

wafat, kuliah-kuliahnya di Qumm tentang akhlak mulai memancarkan kritik terbuka terhadap pemerintah.<sup>13</sup>

Tahun 1963, Khomeini tiga kali ditahan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 25 Januari, 5 Juni dan 5 November. Bulan November 1964, dia ditahan lagi dan diasingkan di Bursa Turki, kemudian pindah ke Najaf (Iraq) pada Oktober 1965. Alasan-alasan pengasingannya antara lain adalah karena dia menentang kebijakan revolusi Turki yang dijalankan oleh Syah dan menentang Undang-undang yang mengatur kekebalan hukum bagi personil militer di Iran.<sup>14</sup> Ketika dia diasingkan di Iraq ini ia menerbitkan majalah *Va-liyati Faqieh*<sup>15</sup> dengan sub judul pemerintahan Islam. Walaupun tidak secara transparan mengemukakan, Khomeini sendiri diharapkan menjadi faqih atau ahli hukum. Dalam teks ini dinyatakan klaimnya bahwa mujtahid merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam hukum Islam, serta harus dipatuhi, dan bahwa kerajaan harus dihapus-kan.<sup>16</sup>

Tahun 1971, Shah mengadakan upacara peringatan “2.500 tahun monarkhi Iran” di Persepolis. Upacara ini mendapat kecaman keras dari Khomeini, yang memperingatkan bahwa siapapun yang mengelola atau ikut serta dalam festival-festival tersebut adalah pengkhianat Islam dan bangsa Iran.<sup>17</sup> Shah menanggapi kecaman ini dengan mengintensifkan tekanannya terhadap para ulama. Tahun 1973, dia mengasingkan 40 ulama simpatisan Khomeini ke tempat-tempat terpencil di Iran. Kegiatan-kegiatan ulama juga dilarangnya. Tahun 1976, memperingati ulang tahun setengah abad dinasti Pahlevi, pemerintah memperkenalkan kalender kerajaan yang mengambil titik tolak dari lahirnya dinasti Acemenia pra-Islam. Karena kalender ini memisahkan diri dari warisan Islam, ia ditentang keras oleh para ulama, khususnya hujjatul Islam Abu al-Hasan Shamsabadi dari Isfahan, yang kemudian dibunuh.

Tahun 1976, presiden AS., Jimmy Carter yang bersemangat menyerukan hak-hak asasi manusia, menyebut Iran sebagai salah satu negara di mana

---

<sup>13</sup>Wilber, *Iran Past*, 335; John L. Esposito, *The Iranian Revolution Its Global Impact* (Miami: Florida International Press, 1990), 40.

<sup>14</sup>Watt, *Fundamentalisme*, 280; Lapidus, *A History*, 618; Wilber, *Iran Past*, 334.

<sup>15</sup>Negara Islam yang dimaksudkan Khomeini adalah yang berdasarkan pada prinsip wilayah al-faqih, suatu konsep politik yang disimpulkan Khomeini dari prinsip imamah dalam Shiah Dua Belas pada masa kegaiban imam Mahdi.

<sup>16</sup>Wilber, *Iran Past and Present*, 333.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 335;

Amerika harus berbuat lebih banyak untuk melindungi kebebasan sipil dan kemanusiaan. Pernyataan Carter ini membuka pintu bagi keberanian para oposan Shah untuk melancarkan kritik-kritik mereka. Pemerintah pun lalu melakukan kebijaksanaan liberalisasi. Bulan Pebruari 1977, 357 orang tahanan politik dibebaskan. Namun, pembebasan ini kemudian mengundang tuntutan lebih lanjut dari pihak oposisi yang terdiri dari kalangan kelas menengah, baik yang modern maupun yang tradisional, termasuk para pengarang, akademisi, politikus, pengacara, dan bahkan hakim-hakim. Di lain pihak, kaum pedangang Bazaar dan siswa-siswa madrasah mengambil metode militan dengan melakukan arak-arakan dan demonstrasi, yang bentrok dengan polisi.<sup>18</sup>

Tanggal 22 Juli 1978, puluhan ribu kaum buruh menyertai iring-iringan pemakaman seorang ulama Masyhad yang terbunuh karena kecelakaan mobil. Iring-iringan ini, yang mungkin sekali juga bersifat demonstrasi, ditembaki oleh polisi, yang mengakibatkan sedikitnya 40 orang mati. Sejak itu, demonstrasi-demonstrasi anti Shah terus mengalir, sementara rekaman-rekaman pidato Khu-mayni mulai beredar. Anggal 7 September 1978, setengah juta orang berbaris di Gedung Majlis di Teheran dengan meneriakkan “matilah Shah!, Khuamayni pemimpin kami, kami ingin pemerintahan Islam”. Al-Khumaini menyatakan bahwa barisan 7 September adalah referendum bahwa regim Shah tidak punya tempat lagi di Iran.<sup>19</sup>

Pada akahirnya kekejaman tentara Syah justru membangkitkan semangat jihad rakyat yang membuahkan kemenangan bagi revolusi Islam pimpinan Khumayni, tumbangnya rezim Shah dan terbentuknya republik Islam Iran yang diatur oleh konsep *wilayatul faqih*<sup>20</sup> yang bersumber dari ajaran *Imamah Shi'ah*.

Shah meninggalkan Teheran pada 16 Januari 1979 dalam pengasingannya dan meninggal pada tanggal 27 Juli 1980 di Kairo. Sepuluh hari sebelum keberangkatannya, seorang Perdana Menteri baru, Shapur Bakhtiar membentuk sebuah kabinet yang terdiri atas sembilan orang. Pada 1 Pebruari 1979, Ayatullah Khumayni kembali ke Teheran dan mengadakan perlawanan

---

<sup>18</sup> Wilber, *Iran Past and Present*, 334-335. Lapidus, *A History*, 615.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 336.

<sup>20</sup> Dalam konsep *wilayatul Faqih*, kekuasaan tertinggi negara ada pada seorang faqih, yang bersikap adil, berkemampuan tinggi dan disepakati oleh mayoritas rakyat.

an dengan pemerintah, sehingga pada pertengahan Pebruari 1979 posisi Bakhtiar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan ia pun meninggalkan Iran. Khomeini mengambil alih kendali pemerintahan dan membentuk suatu dewan revolusioner dalam menjalankan pemerintahannya.

Dewan revolusioner menyiapkan draft konstitusi baru. Satu ketetapan me-nyatakan bahwa sekte Imam 12 sebagai agama resmi negara. Pada satu April 1979, sebuah referendum menetapkan bentuk Republik Islam Iran. Konstitusi ini merupakan sebuah dokumen yang lengkap. Mukaddimahnya terdiri dari 4000 kata yang berisi tentang revolusi dan gagasan-gagasan ideal tentang negara Islam. Dalam konstitusi ini terdapat 125 pasal.<sup>21</sup>

### **Praktek Imamah di Masa Modern**

Salah satu persoalan yang timbul di kalangan kaum Shi'ah Ithna Ash-ariyah setelah terjadinya kegaiban Besar Imam ke-12 pada tahun 941 m adalah siapa yang harus dijadikan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Masalahnya, karena Imam ke-12 itu –dalam keyakinan Shiah- masih hidup, maka tak seorangpun yang bisa memperoleh pembenaran teoritis untuk menggantikan posisinya.

Maka dalam prakteknya, kaum Shi'ah lalu mengambil sikap pragmatis yang tidak terlalu menyimpang dari prinsip yang mereka yakini, yaitu jika penguasa temporal yang ada adalah seorang yang kuat dan bersikap adil, maka banyak ulama Shi'ah yang bekerja sama dengannya. Sebaliknya jika penguasa tersebut adalah seorang yang lemah atau zalim, maka para ulama akan mengemukakan klaim mereka sebagai wakil Imam dan menyuarakan penentangan mereka terhadap otoritas duniawi, sebagaimana yang bisa dilihat dalam sejarah Iran sesudah munculnya dinasti safawi.<sup>22</sup>

Dengan berdirinya Republik Islam Iran, setelah kemenangan revolusi 1979, persoalan imamah kembali ramai dibicarakan. Selama Imam Khomeini masih hidup, tampaknya secara praktis dialah yang memegang jabatan wakil imam (*naib al-imam*) itu. hal ini dinyatakan secara tidak langsung dalam pasal 5 Undang-undang dasar Republik Islam Iran:

---

<sup>21</sup> Wilber, *Iran Past and Present*, 337-338; John Foran, *A Century of Revolution, Social Movements in Iran* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), 189.

<sup>22</sup> Henry Corbin, "The Meaning of The Imam for Shi'i Spirituality," *Shi'ism: Doctrines, Thought and Spirituality*, ed. Sayyed Hossein Nasr et. al (New York: tp, 1988), 156.

“Selama masa ketidakhadiran imam ke-12 (semoga Allah mempercepat kehadirannya) dalam Republik Islam Iran, maka kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggungjawab dari seorang faqih yang adil dan taqwa, mengenal zaman, pemberani, giat, dan berinisiatif, yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat sebagai pemimpin mereka”.

Kepemimpinan oleh seorang faqih yang memiliki syarat-syarat di atas inilah yang umumnya dikenal sebagai konsep *wilayat al-faqih*, yang idenya pertama kali dicetuskan sendiri oleh Khomeini di tempat pengasingannya di Najaf, Iraq, dalam bentuk serangkaian ceramah yang diberikannya kepada para siswanya pada tahun 1970, dan dipublikasikan pada tahun 1971 dengan judul “hukumat-e-Islami (pemerintahan Islam). Ketika Republik Islam Iran berdiri, secara praktis Khomeini sendiri juga dipandang sebagai faqih yang memegang wilayat tersebut. Dukungan mayoritas rakyat Iran kepada Imam Khomeini sebagai wali faqih tampaknya tidak bisa ditandingi oleh siapa pun, sehingga untuk mengantisipasi wafatnya, orang tidak mengharapkan munculnya satu orang pengganti, melainkan suatu dewan yang terdiri dari para fuqaha’, sebagaimana dinyatakan dalam kelanjutan pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila faqih seperti itu tidak mempunyai mayoritas (pendukung) semacam itu, maka suatu dewan pimpinan yang terdiri dari para fuqaha’ yang mempunyai syarat-syarat tersebut di atas, akan memegang tanggungjawab”.

Dewan pimpinan yang dimaksud dalam kenyataannya adalah Majelis Ahli (Majlis-i Khubregan) yang dipilih oleh rakyat pada tanggal 3 Agustus 1979, dan yang telah merancang UUD Republik Islam Iran. Dengan mengecualikan tiga orang wakil dari kelompok agama minoritas (Kristen, Yahudi dan Zoroaster), serta satu orang anggota yang didiskualifikasi, Majelis ini mempunyai anggota sebanyak 69 orang. Dari 69 orang ini, 45 orang di antaranya adalah ulama, sedang sisanya (24 orang) bukan ulama.

Majlis ini berfungsi sebagai dewan pengawas jalannya pemerintahan, yang memegang kekuasaan tertinggi negara. Adapun pelaksanaan kekuasaan atau pemerintahan itu sendiri berada di tangan tiga lembaga pemerintahan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing dari ketiga-

nya berdiri sendiri sebagaimana dinayatkan dalam pasal 57 UUD Republik Islam Iran:

“Tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan imamah sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam Undang-Undang dasar ini. Ketiga kekuasaan ini independen satu dari lainnya, dan presiden adalah penghubung di antara ketiga lembaga tersebut”.

Penjelasan ketiga kekuasaan ini bisa dilihat dalam pasal 58, 60 dan 61 sebagai berikut:

Pasal 58:

“Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis Syura Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perundang-undangan yang disahkan oleh Majelis tersebut diteruskan kepada badan eksekutif dan badan yudikatif untuk pelaksanaannya, setelah menyelesaikan berbagai tahap yang diuraikan dalam pasal-pasal yang berikut”.

Pasal 60:

“Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, Perdana Menteri dan Dewan Menteri, kecuali dalam hal-hal di mana pemimpin secara langsung bertanggungjawab menurut Undang-undang”.

Pasal 61:

“Kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan di atas dasar prinsip-prinsip Islam dan yang akan menyelesaikan persengketaan-persengketaan, melindungi hak-hak umum dan perluasan, administrasi, keadilan, dan pelaksanaan perintah-perintah Ilahi”.

Berkaitan dengan Undang-undang yang sifatnya sangat mendesak dan penting, maka badan legislatif dapat melakukan referendum, sebagaimana tersebut dalam pasal 59:

“Dalam masalah-masalah penting, mengenai masa depan negara, atau masalah perekonomian yang sangat penting, persetujuan (atas) undang-undang dapat diperoleh dengan jalan melakukan referen-

dum dan dengan rujukan langsung kepada suara rakyat. Permintaan untuk melakukan referendum harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota majlis”.

### Penutup

Pemerintahan kerajaan Iran sebelum masa Khumayni dijalankan oleh para penguasa yang sangat absolut. Mereka banyak melakukan penindasan masif atas nama pembaharuan. Hal ini nampak pada masa Reza Shah dan Muhammad Reza Pahlavi. Akan tetapi ulama dan masyarakat sipil hanya menentang dengan cara diam saja karena tidak mempunyai keberanian.

Setelah muncul berbagai oposan di banyak daerah, mereka mulai berani untuk menentang Shah secara terang-terangan. Dan puncaknya terjadi pada masa Khumayni. Keberhasilan mereka ditandai dengan tumbangannya rezim Shah dan dihapuskannya sistem kerajaan serta dibentuknya Republik Islam Iran pada 1 April 1979.

Praktek Imamah di masa modern banyak bersumber dari ajaran *Shi'ah Ithna Ash'ariyah* dengan menggunakan konsep *Wilayat al-Faqih*. Dengan menelaah pasal-pasal yang dikutip di atas dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, kiranya jelaslah sudah gambaran struktur kekuasaan di Iran sekarang ini sepeninggal Imam al-Khumayni, yang dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan urusan-urusan negara, terdapat tiga lembaga yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, di atas itu masih ada Dewan Ahli yang fungsinya tidak dinyatakan secara tegas, tapi tampaknya memegang kekuasaan yang paling tinggi dalam struktur kekuasaan di Iran saat ini.

### Daftar Pustaka

- Corbin, Henry. "The Meaning of the Imam for Shi'I Spirituality," in Sayyed Hossein Nasr et. al. (ed.), *Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality* (New York: tp, 1988).
- Esposito, John L. *The Iranian Revolution Its Global Impact* (Miami: Florida International Press, 1990).
- Foran, John. *A Century of Revolution, Social Movements in Iran* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).

- Glase, Cyrill. *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).
- Keddie, Nikki R. and Eric Hooglund. *The Iranian Revolution and The Islamic Republic* (New York: Syracuse University Press, 1982).
- ..... *Religion and Politics in Islam* (London: Yale University Press, 1983).
- ..... *Roots of Revolution: an Interpretative History of Modern Iran* (Binghamton, Yale University Press, 1981).
- Kleden, Ansis. "Iran," *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, vol. 2. Tim Penyusun Ensiklopedi Islam (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989).
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies* (New York: Cambridge University Press, 1990).
- Martin, Vanessa. *Islam and Modernism, The Iranian Revolution of 1906* (New York: Syracuse University Press, 1989).
- Moin, Baqer. "Khomeini, Ruhollah al-Musavi". *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. vol. 2. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1995).
- Mortimer, Edward. *Faith and Power: The Politic of Islam* (New York: Fintage Book, 1982).
- Nashat, Guity. *The Origins of Modern Reform in Iran, 1870-80* (London: University of Illinois press, 1982).
- Sihbudi, M. Riza. *Bara Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 1993).
- Watt, William Montgomery. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, ter. Taufik Adnan Amal (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Wilber, Donald N. *Iran Past and Present: From Monarchy to Islamic Republic* (New Jersey: Princenton University Press, 1981).
- Zajani, Bizhan. *Capitalism and Revolution in Iran* (London: Zed Press, 1980).